

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*. UU Nomor 8 Tahun 1999. LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3281.
- _____. *Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan*. UU Nomor 21 Tahun 2011. LN No. 111 Tahun 2011. TLN No. 5253.
- _____. *Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. UU Nomor 8 Tahun 2008. LN No. 58 Tahun 2008. TLN No. 4843.
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. POJK Nomor 1/POJK.07/2013. LN No. 118 Tahun 2013. TLN No. 5431
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. POJK Nomor 77/POJK.01/2016. LN No. 324 Tahun 2016. TLN No. 6005.
- _____. *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*. Perkominfo Nomor 20 Tahun 2016. BN No 1829 tahun 2016.
- _____. *Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial*. PBI Nomor 19/12/PBI/2017. LN No. 245 Tahun 2017. TLN No. 6142.
- _____. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan*. POJK Nomor 13/POJK.02/2018. LN No. 135 Tahun 2018. TLN No. 6238.

B. Buku

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Barkatullah, Abdul, Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media, 2010.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Cet. VI. Jakarta: Kencana, 2011.
- Kurniawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Malang: Elektronik Pertama, 2011.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mansur, Dikdik, M., Arief & Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Sebagai Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman, Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Muhammad, Abdulkadir dan Rilda Murniati. *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Rosmawati. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Subekti. R., dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2016.
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Tri, Siwi, Kristiyanti, Celin. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Wihardjadinata, Dodo. S. D. *Bunga Rampai Filsafat Ilmu dan Filsafat Hukum*. Bogor: Fakultas Hukum Universitas Pakuan, 2009.

C. Lain-Lain

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. "Tentang AFPI" tersedia di <https://afpi.or.id/>. diakses tanggal 31 Desember 2019.

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. "Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab". tersedia di <https://www.afpi.or.id>. diakses tanggal 31 Desember 2019.

Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, Ery Agus Priyono. "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia". *Refleksi Hukum*. Vol. 3. No. 2. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2019.

Budiyanti, Eka. "Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal". *Info Singkat*. Vol. XI, No.4/II/Puslit/Februari/2019.

Budiharto, Ernama dan Hendro. S. "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6. No.3. Tahun 2017.

CNBC Indonesia. "Daftar Terbaru, 125 Fintech Ilegal yang Disikat OJK". tersedia di <https://www.cnbcindonesia.com>. diakses tanggal 30 Desember 2019.

CNN Indonesia. "RupiahPlus Akui Pelanggaran Penagihan Utang Ke Peminjam". tersedia di <https://www.cnnindonesia.com>. diakses tanggal 3 Januari 2020.

Dewi, Sinta. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di

Indonesia". *Yustisia*, Volume 5. Nomor 1. Januari-April 2016.

Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*. Jakarta : Departemen Perlindungan Konsumen OJK, 2017.

DetikFinance. "OJK Keluarkan Aturan Fintech". Tersedia di <http://www.detikfinance.com>. Diakses tanggal 27 September 2019.

Dosma, Sinaga, Rebekka. 2013. "Sistem Koordinasi Antara Bank Indonesia Dan Otoritas Jasakeuangan Dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan". *Jurnal Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara*. Vol. No. 2.

Fauzan, Raka. Elisatris, Gultomb, Anita Afrianac. "Penegakan Hukum Terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending Dalam Kegiatan Penagihan Pinjaman Uang Yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan Dengan Hukum Perlindungan Konsumen". *Acta Diurnal*. Vol. 2. Nomor 2. Juni 2019.

Fattah, Damanhuri. "Teori Keadilan Menurut Jhon Rawls". *Jurnal TAPIS* Vol. 9 No 2 Juli – Desember. Tahun 2013.

Kementrian Komunikasi dan Informatika. "Fintech Lending Langgar Aturan Lakukan Persekusi digital". tersedia di <https://kominfo.go.id>. diakses tanggal 30 Desember 2019.

Kompas. "Banyak Aduan Soal Pinjaman Online. Ini Komentar OJK", tersedia di <https://money.kompas.com>. diakses tanggal 3 Januari 2020.

Kompas. "Hingga Desember 2019, OJK Blokir 1.898 Pinjaman Online Ilegal". tersedia di <https://megapolitan.kompas.com>. diakses tanggal 3 Januari 2020.

Ningrum, Ivana Elvia. Skripsi: "Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending (Tunaiku)

Yang Batal Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan".
Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2019.

Nuryadin. Wawancara. "Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)". Tanggal 13 Januari 2020.

Otoritas Jasa Keuangan. "Strategi Perlindungan Konsumen Keuangan Tahun 2013-2027". Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan. "Perusahaan Fintech Lending Berizin dan Terdaftar di OJK". tersedia di <https://ojk.go.id>. diakses tanggal 30 Oktober 2019.

Otoritas Jasa Keuangan. "Daftar Fintech Peer-to-Peer Lending Tidak Terdaftar atau Berizin dari OJK November 2019". tersedia di <https://www.ojk.go.id/>. diakses tanggal 3 Januari 2020.

P., Jimmy dan M. Marwan. *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Poerwadarminta, W. J. S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka, 1983.

Republika. "OJK Diminta Awasi *Fintech* secara preventif. tersedia di <https://www.republika.co.id/berita/pvcvdw423/ojk-diminta-awasi-fintech-secara-preventif>. diakses tanggal 16 Januari 2020.

Romanna, Tampubolon, Heryucha. 2019. "Seluk-Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia". *Jurnal Bisnis Mulia Hukum*. Vol. 3. No. 2.

Rahmayani, Nuzul. "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia". *Pagaruyuang Law Journal*. Edisi No. 1 Vol. 2. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. 2018. hlm.36.

Setiaji, Bagas. Wawancara. "Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". Tanggal 19 Maret 2020.

Suwandono, Agus. 2016. "Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan Dikaitkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen". *Perspektif*. Vol. 21 No. 1.

Tribun Jateng. 2019 "Fintech Legal Mulai Dilaporkan Bermasalah". Tersedia di <https://jateng.tribunnews.com>. Diakses tanggal 27 September 2019.

Tribun Jateng. "Nita Diteror dan Dipermalukan Penyediaan Pinjaman Online". tersedia di <https://jateng.tribunnews.com>. diakses tanggal 3 Januari 2020.

Wicaksono, Fransiskus, Putra, Daru. "Pinjaman Uang Berbasis Online Ditinjau Dari Teori Kebebasan Manusia". Falkutas Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Madiun, Tahun 2019.